

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Demak

Halaman 2

Demak Kembali Raih Opini WTP dari BPK

DEMAK - Kabupaten Demak tahun 2018 ini kembali memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI. Sebuah prestasi luar biasa bagi sebuah wilayah seperti Demak, karena ini adalah untuk yang kedua kalinya setelah tahun 2017 juga mendapat prestasi yang sama. Demak dibawah kepemimpinan Bupati HM.Natsir dan Wakil Bupati Drs.Joko Sutanto memiliki 16 program unggulan guna tercapainya Visi Kabupaten yaitu Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis. Misi Kabupaten Demak diantaranya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

Salah satu bentuk parameter tata kelola yang baik adalah akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Untuk pengelolaan keuangan terdapat sistem pemeriksaan oleh BPK-RI dalam memberikan opini atas tingkat akuntabilitasnya. Terhadap hal tersebut Presiden Jokowi mencanangkan target opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 65 % untuk seluruh Pemerintah Daerah. Dari hasil pemeriksaan BPK untuk Kabupaten Demak sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, lima tahun lamanya, Pemerintah Kabupaten Demak mendapatkan opini WDP atau wajar dengan pengecualian. Dibawah coordinator Sekretaris Daerah mereka bekerja keras mempersiapkan langkah-langkah strategis dengan misi visi "WTP Harga Mati" sedangkan misinya adalah Membentuk Satuan Tugas WTP dan Penataan Aset. Berbagai pembenahan aset dilakukan dari hulu hingga hilir sampai akhirnya kerja keras mereka terbayar dengan diperolehnya prestasi WTP dari BPK RI pada tahun 2017 lalu.

Tahun 2018 ini, predikat prestisius tersebut kembali dipertahankan oleh Kabupaten Demak, masih dengan misi visi "WTP Harga Mati". Hal ini terlihat dari diterimanya LHP LKPD dengan opini WTP



TERIMA WTP: Bupati Demak HM Natsir saat menerima LHP LKPD dengan opini WTP dari Kepala BPK perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo Senin (28/5) malam kemarin.

yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo kepada Bupati Demak HM Natsir di Gedung BPK Perwakilan Jateng, Senin (28/5) malam.

Bupati Demak HM Natsir dengan didampingi Kepala Inspektorat Kurniawan Ari-fendi menjelaskan, bahwa opini WTP sudah merupakan kewajiban bagi Pemkab Demak untuk mendapatkannya.

"Jadi karena memang sudah kewajiban, ya maka harus dicapai lagi. Karena memang sudah kewajiban, maka jika tidak memperolehnya maka tidak bisa melakukan pelayanan yang lain. Begitu juga WTP juga harus tertib, jika tidak maka pelayanan yang lain juga tidak akan tertib," ujar Bupati.

Dijelaskan oleh bupati, bahwa selama ini yang menjadi ukuran WTP ada empat. Keempatnya masing-masing adalah masalah aset, sistem pengendalian internal atau SPI yang dibangun sepanjang tahun oleh OPD sehingga iklim sudah terbentuk. Kepatuhan terhadap aturan, termasuk menjalankan semua temuan BPK. Terakhir adalah kesanggupan menjalankan kesesuaian yang berlaku yakni tidak salah dalam menyajikan administrasi.

"Selama ini temuan-temuan BPK yang

direkomendasi agar diperbaiki selain berupa aset adalah fisik. Yaitu pembangunan sarana dan prasarana, bisa berupa jalan jembatan dan gedung. Keberhasilan Demak meraih WTP karena adanya komitmen dari para kepala dan OPD," tutur bupati.

Bupati juga menyinggung mengenai WTP tahun 2017 dan pola pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan sangat teliti sekali. Saat itu terdapat 2016 ruas jalan yang disurvei oleh BPK, yang dihitung mulai ketebalan jalan lebar dan panjang jalan serta masih banyak lagi. BPK saat itu juga melakukan pemeriksaan terhadap dana desa (DD) serta alokasi dana desa (ADD)

"Ada 243 desa yang mendapatkan DD ADD. Hal ini sempat menjadi perhatian pemkab. Karena Demak rawan dengan riuh protes warga terkait pembangunan dari ADD. Kemudian upaya pendekatan dilakukan oleh inspektorat, agar desa memberi laporan pertanggungjawaban penggunaan DD ADD," imbuh Natsir. BPK sendiri menurut bupati, melakukan audit dalam dua tahap. Tahap pendahuluan dilakukan selama 20 hari dan audit lanjutan dilakukan selama 30 hari. Selama pelaksanaan audit semua kepala OPD terjun langsung menjelaskan tentang hasil-hasil pembangunan dan yang ditanyakan oleh BPK. (adi/muz)

Liputan Khusus